

2021

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Pengadilan Agama Banjarnegara



Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl. Letjend Suprpto Banjarnegara

Telp: 0286 592810

Email: pabanjarnegara@gmail.com

DAFTAR ISI

BAB I	0
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan pengadilan.....	23
BAB IV	24
PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Rekomendasi	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan Banjarnegara ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 (enam) bulan atau 2 (dua) kali setahun.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Agama Banjarnegara. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang datang menuju meja pelayanan dapat digunakan sebagai sampel.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga minggu (08/03/2021 s/d 26/03/2020) dengan jumlah responden sebanyak 125 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh tim pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara). Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2.1

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya

5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.2
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SD yaitu sebesar 43,20%, diikuti SMA sebesar 26,40% dan SMP sebesar 24,80%.

Berikut adalah rincian tingkat pendidikan responden survei Pengadilan Agama Banjarnegara:

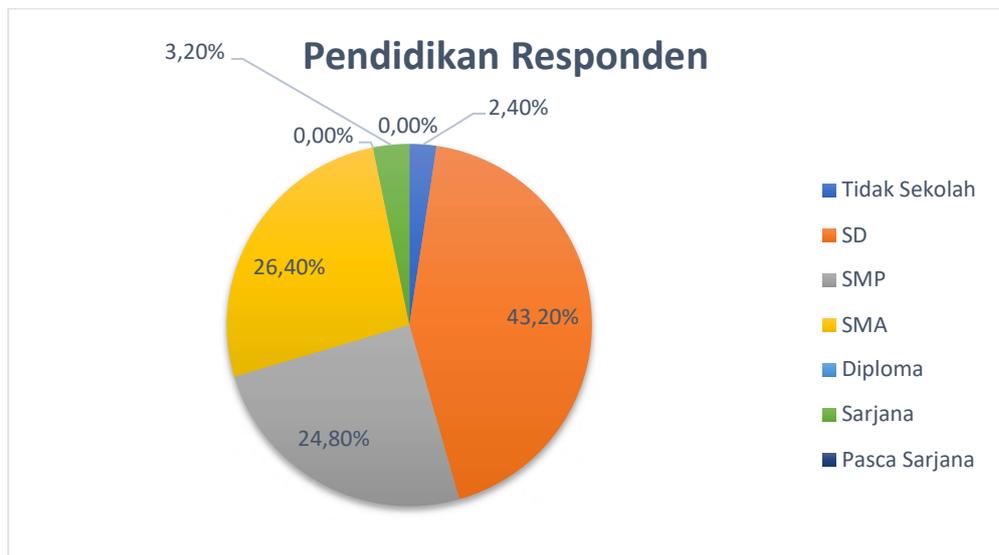
Tabel 3.1

Tabel Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	3	2,40%
2	Sekolah Dasar	54	43,20%
3	Sekolah Menengah Pertama	31	24,80%
4	Sekolah Menengah Atas	33	26,40%
5	Diploma	0	0,00%
6	Sarjana	4	3,20%
7	Pasca Sarjana	0	0,00%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.1

Grafik Presentase Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 36,80% pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki pekerjaan sebagai Buruh/Petani, diikuti 32,20% sebagai Wiraswasta. Berikut adalah rincian tingkat pendidikan responden survei Pengadilan Agama Banjarnegara:

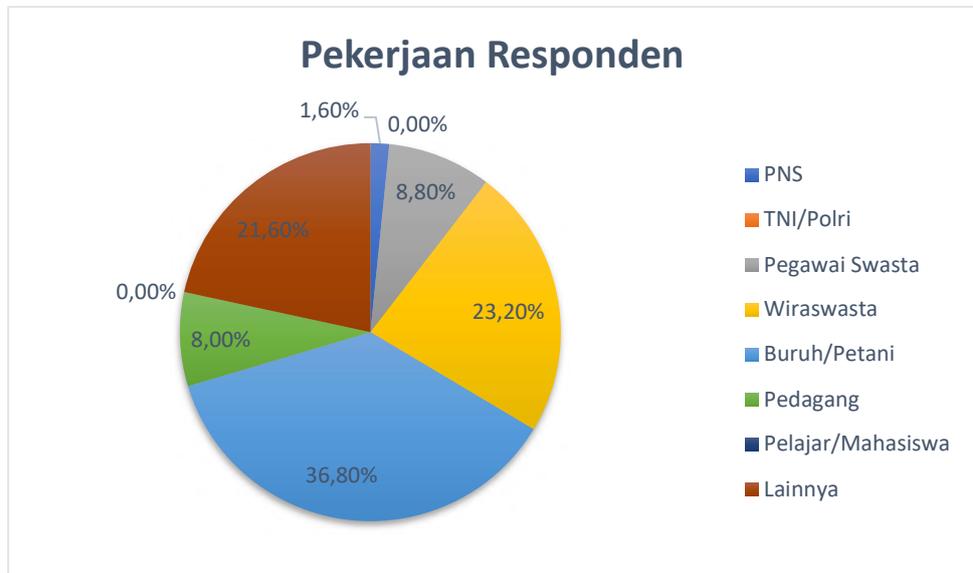
Tabel 3.2

Tabel Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	2	1,60%
2	TNI/Polri	0	0,00%
3	Pegawai Swasta	11	8,80%
4	Wiraswasta	29	23,20%
5	Buruh/Petani	46	36,80%
6	Pedagang	10	8,00%
7	Pelajar/Mahasiswa	0	0,00%
8	Lainnya	27	21,60%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.2

Grafik Presentase Jenis Pekerjaan Responden



3.1.3. Jenis Kelamin responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa, responden paling banyak berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebesar 57,60% sementara perempuan sebesar 42,40%. Berikut adalah rincian jenis kelamin responden survei Pengadilan Agama Banjarnegara:

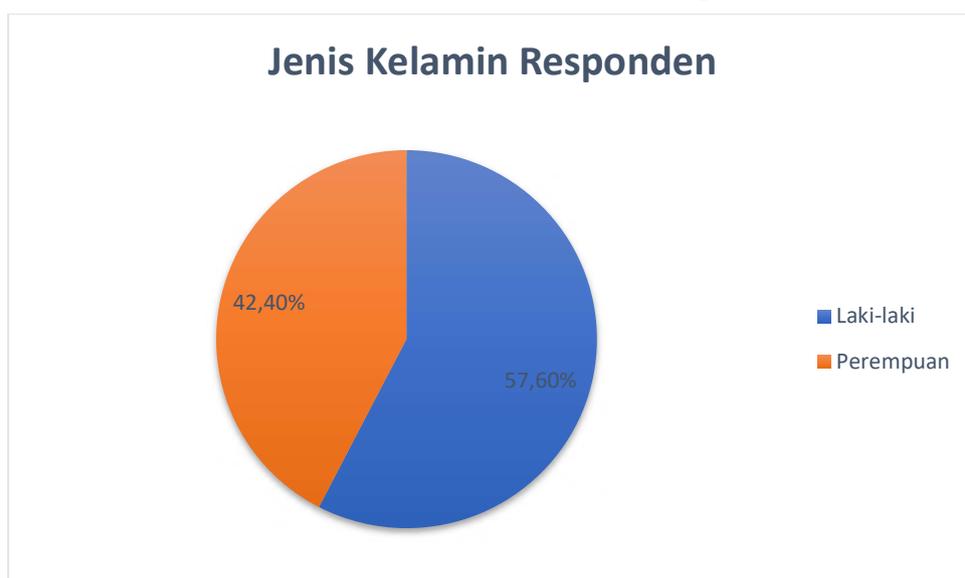
Tabel 3.3

Tabel Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	72	57,60%
2	Perempuan	53	42,40%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.3

Grafik Presentase Jenis Kelamin Responden



3.1.4. Kelompok usia responden

Responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 39 tahun dengan presentase sebesar 37,60%. Berikut adalah rincian jenis kelamin responden survei Pengadilan Agama Banjarnegara:

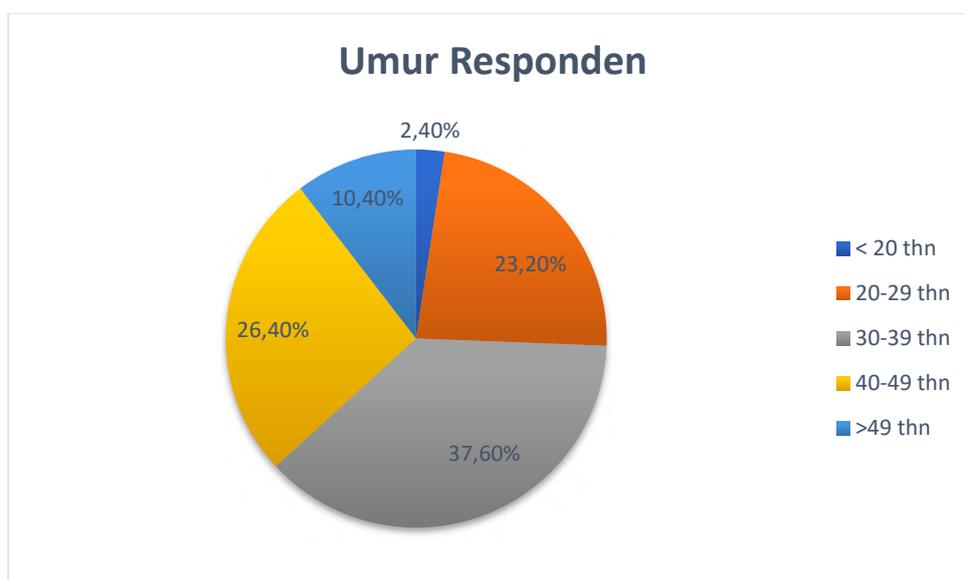
Tabel 3.4

Tabel Kelompok Umur Responden

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	< 20 tahun	3	2,40%
2	20-29 tahun	29	23,20%
3	30-39 tahun	47	37,60%
4	40-49 tahun	33	26,40%
5	> 49 tahun	13	10,40%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.4

Grafik Presentase Usia Responden



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

Responden diberikan 10 pertanyaan yang mengindikasikan apakah terdapat manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan, menjual pengaruh, transaksi biaya, biaya tambahan, hadiah, transparansi biaya, percaloan, perbuatan curang dan transaksi rahasia. Atas pertanyaan yang diajukan, responden memberikan respon dengan 6 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju, Setuju, Cukup Setuju Kurang Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Data yang diterima kemudian diolah dan dikonversi dalam skala 1-4 agar dapat diperoleh indeks persepsi total maupun indeks persepsi per indikator. Hasil persepsi indikator per indikator adalah sebagai berikut:

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,85**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu?

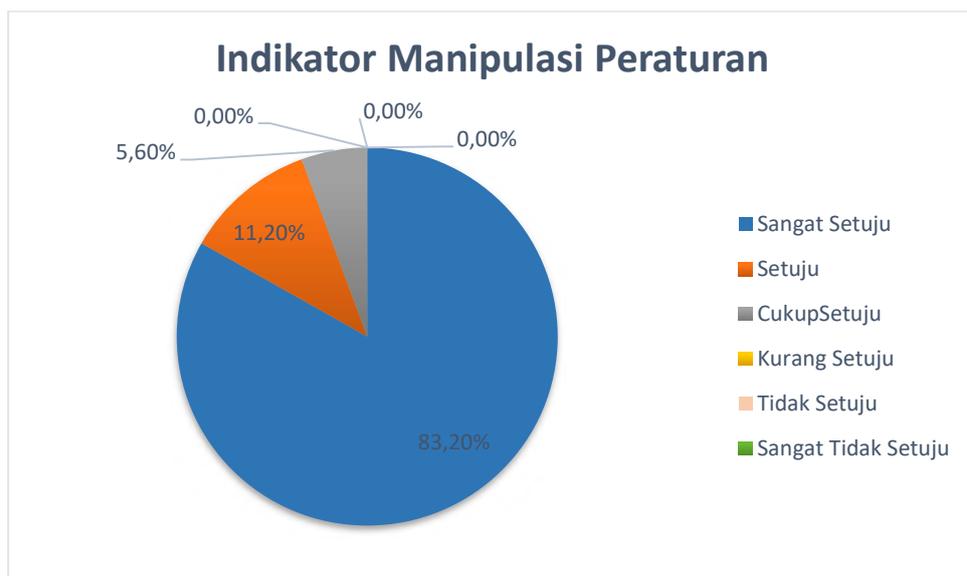
Tabel 3.5

Tabel Hasil Survey Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	104	83,20%
2	Setuju	14	11,20%
3	Cukup Setuju	7	5,60%
4	Kurang Setuju	0	0%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.5

Grafik Indikator Manipulasi Peraturan



Seperti yang terlihat pada data, seluruh responden pada prinsipnya setuju bahwa tidak ada manipulasi peraturan pada Pengadilan Agama Banjarnegara.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,86**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

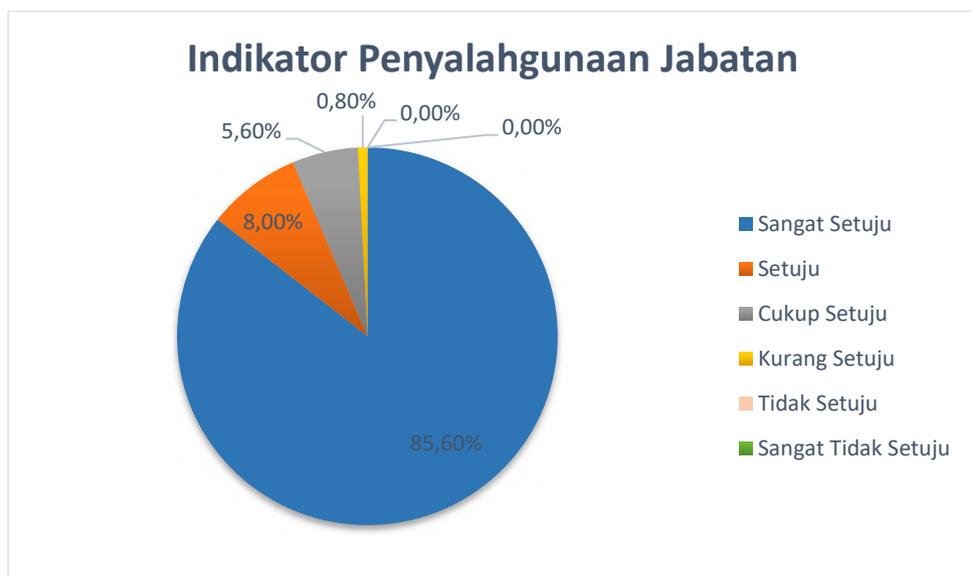
Tabel 3.6

Tabel Hasil Survey Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	107	85,60%
2	Setuju	10	8,00%
3	Cukup Setuju	7	5,60%
4	Kurang Setuju	1	0,80%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.6

Grafik Indikator Penyalahgunaan Jabatan



Walaupun mayoritas responden (85,60%) menjawab Sangat Setuju tidak ada Penyalahgunaan Jabatan, namun terdapat 0,80% responden yang Kurang Setuju atas hal tersebut. Hal ini harus tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan integritas aparatur.

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,75**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bersih dari Menjual Pengaruh.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu?

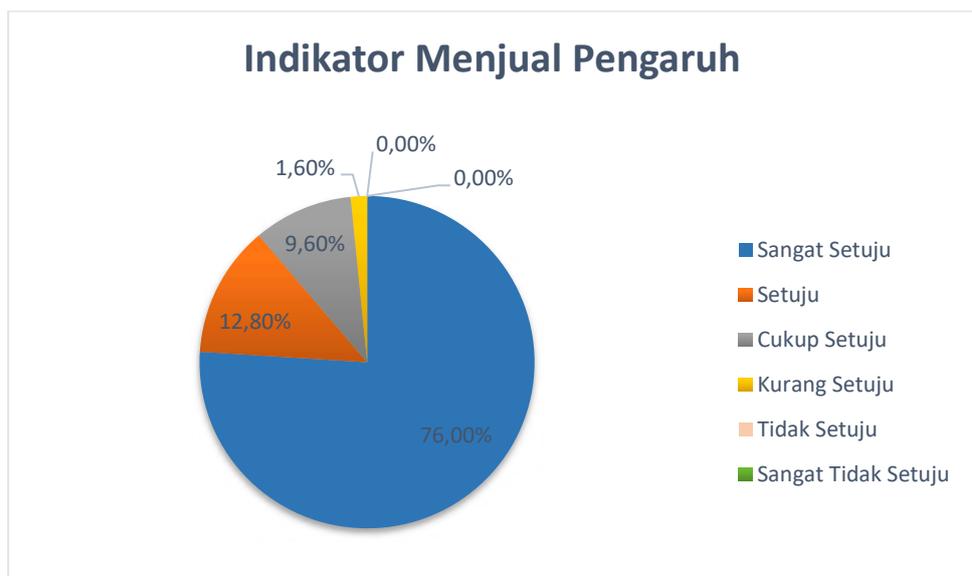
Tabel 3.7

Tabel Hasil Survey Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	95	76,00%
2	Setuju	16	12,80%
3	Cukup Setuju	12	8,60%
4	Kurang Setuju	2	1,60%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.7

Grafik Indikator Menjual Pengaruh



Adanya 1,60% responden yang Kurang Setuju tidak ada Penjualan Pengaruh harus menjadi perhatian. Walaupun minor, namun perlu didalami indikasi ini apakah benar pegawai atau orang luar yang mengaku sebagai pegawai.

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,79**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara transparan dalam menyampaikan biaya.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh?

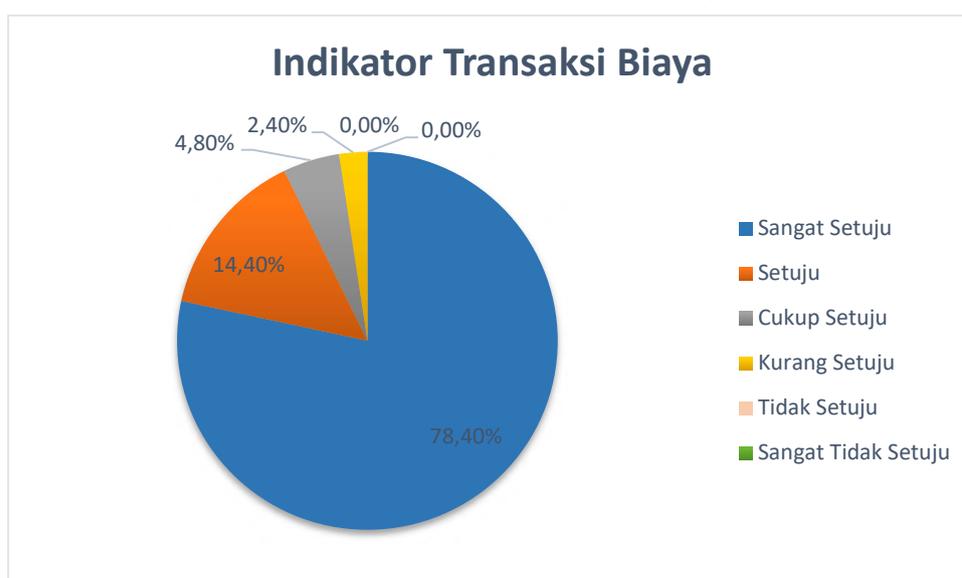
Tabel 3.8

Tabel Hasil Survey Indikator Transaksi Biaya

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	98	78,40%
2	Setuju	18	14,40%
3	Cukup Setuju	6	4,80%
4	Kurang Setuju	3	2,40%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.8

Grafik Indikator Transaksi Biaya



Masih terdapat 2,40% responden yang Kurang Setuju Transaksi Biaya mudah diakses. Perbaikan atas hal ini seharusnya mudah dilaksanakan karena berkaitan dengan publikasi.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,87**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bebas dari Tambahan Biaya.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah pembayaran biaya perkara sesuai dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan?

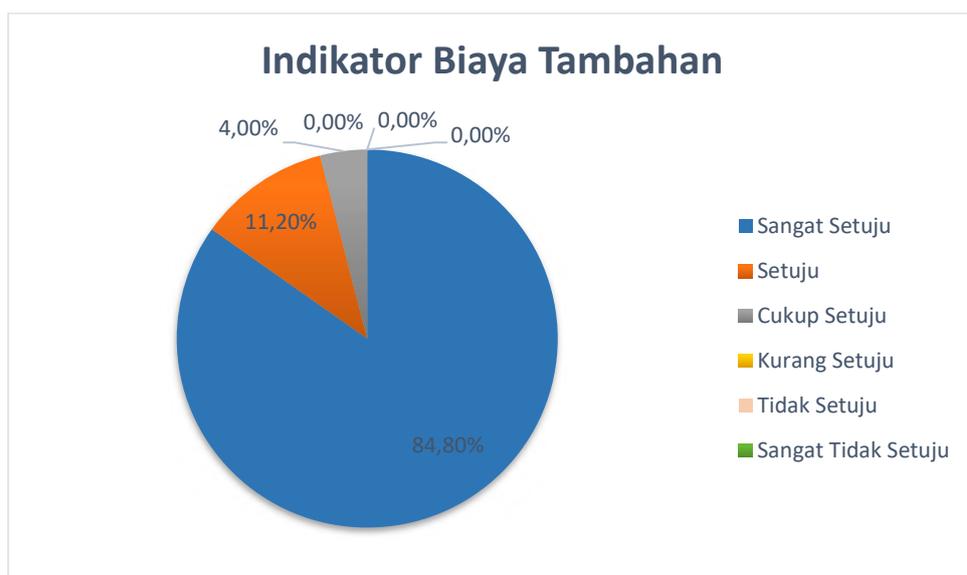
Tabel 3.9

Tabel Hasil Survey Indikator Tambahan Biaya

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	106	84,80%
2	Setuju	14	11,20%
3	Cukup Setuju	5	4,00%
4	Kurang Setuju	0	0%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.9

Grafik Indikator Tambahan Biaya



Seperti yang terlihat pada data, seluruh responden pada prinsipnya setuju bahwa tidak ada Tambahan Biaya pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,80**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Agama Banjarnegara bebas dari Hadiah.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima?

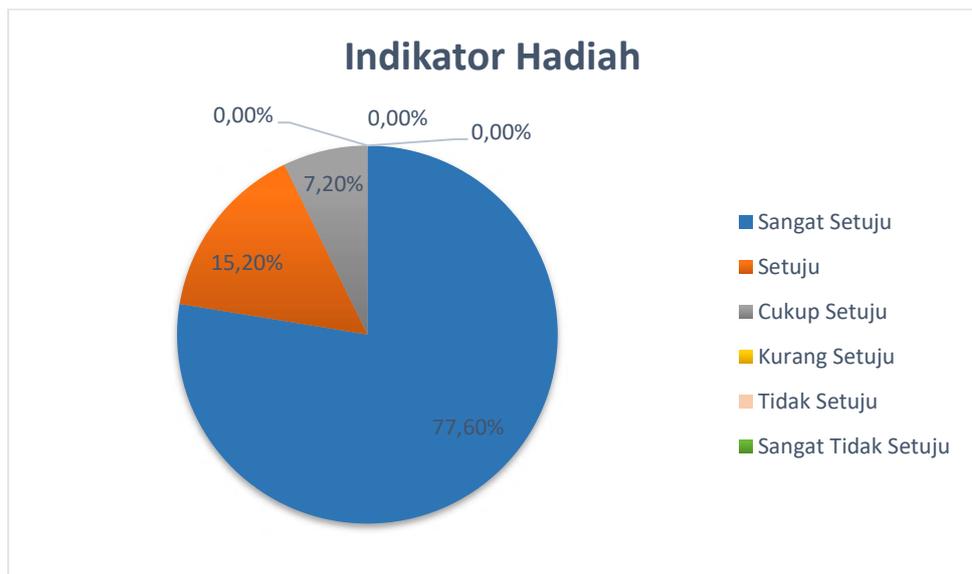
Tabel 3.10

Tabel Hasil Survey Indikator Hadiah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	97	77,60%
2	Setuju	19	15,20%
3	Cukup Setuju	9	7,20%
4	Kurang Setuju	0	0%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.10

Grafik Indikator Hadiah



Seperti yang terlihat pada data, seluruh responden pada prinsipnya setuju bahwa tidak ada pemberian Hadiah pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara.

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,74**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Transparan dalam Pembayaran Biaya.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah pembayaran dilakukan?

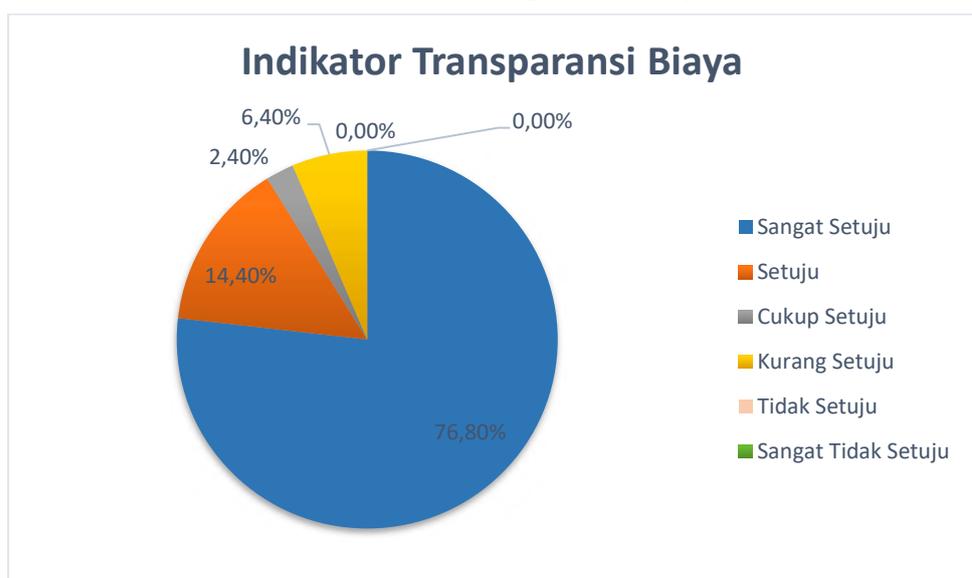
Tabel 3.11

Tabel Hasil Survey Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	96	76,80%
2	Setuju	18	14,40%
3	Cukup Setuju	3	2,40%
4	Kurang Setuju	8	6,40%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.11

Grafik Indikator Transparansi Biaya



Masih adanya 6,40% responden yang merasa Kurang Setuju bahwa Transparansi Biaya sudah dilaksanakan perlu untuk ditindaklanjuti.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,74**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bersih dari tindakan Percaloan.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?

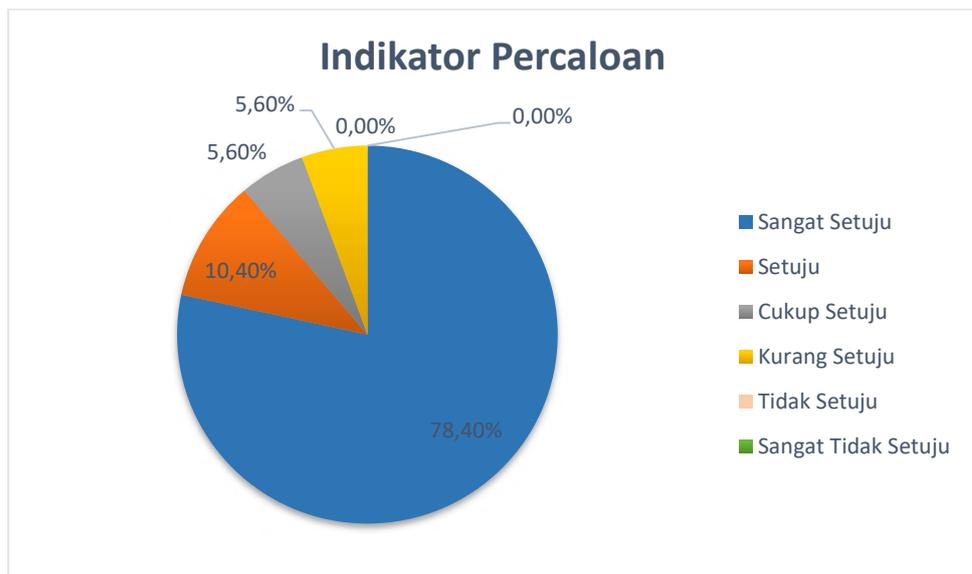
Tabel 3.12

Tabel Hasil Survey Indikator Percaloan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	98	78,40%
2	Setuju	13	10,40%
3	Cukup Setuju	7	5,60%
4	Kurang Setuju	7	5,60%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.12

Gambar Indikator Percaloan



Walaupun mayoritas responden menjawab Sangat Setuju tidak ada Percaloan, namun terdapat 5,60% responden yang Kurang Setuju. Hal ini cukup disayangkan dan harus menjadi perhatian seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Banjarnegara.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,86**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bebas dari Perbuatan Curang.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah Apakah tidak pernah melihat dan atau mendengar terjadi praktek KKN di pengadilan?

Tabel 3.12

Tabel Hasil Survey Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	99	79,20%
2	Setuju	25	20,00%
3	Cukup Setuju	1	0,80%
4	Kurang Setuju	0	0%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.13

Grafik Indikator Perbuatan Curang



Seperti yang terlihat pada data, seluruh responden pada prinsipnya setuju bahwa tidak ada Perbuatan Curang pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,80. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bebas dari Transaksi Rahasia.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini adalah apakah tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/Staf pengadilan di luar persidangan?

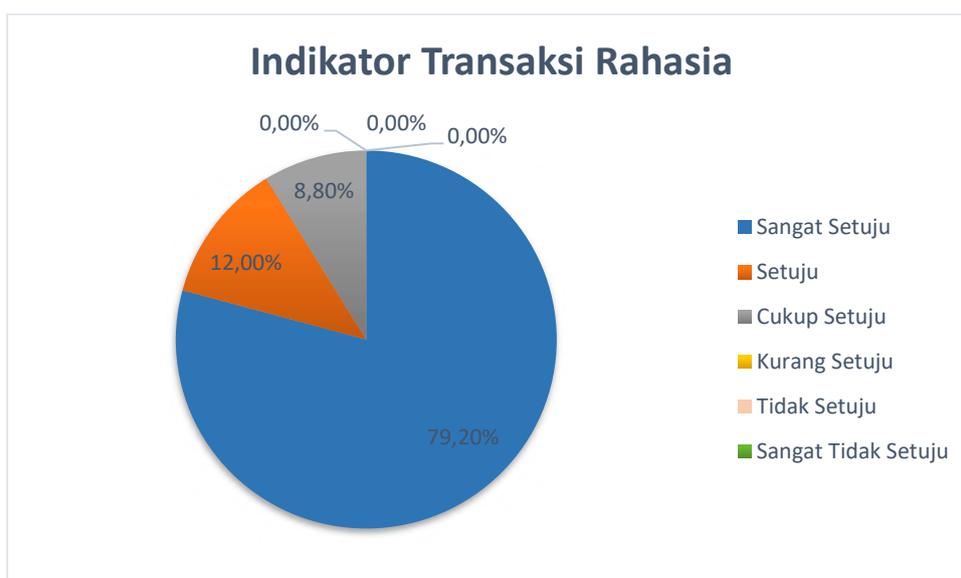
Tabel 3.12

Tabel Hasil Survey Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	99	79,20%
2	Setuju	15	12,00%
3	Cukup Setuju	11	8,80%
4	Kurang Setuju	0	0%
5	Tidak Setuju	0	0%
6	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	125	100%

Gambar 3.14

Grafik Indikator Transaksi Rahasia



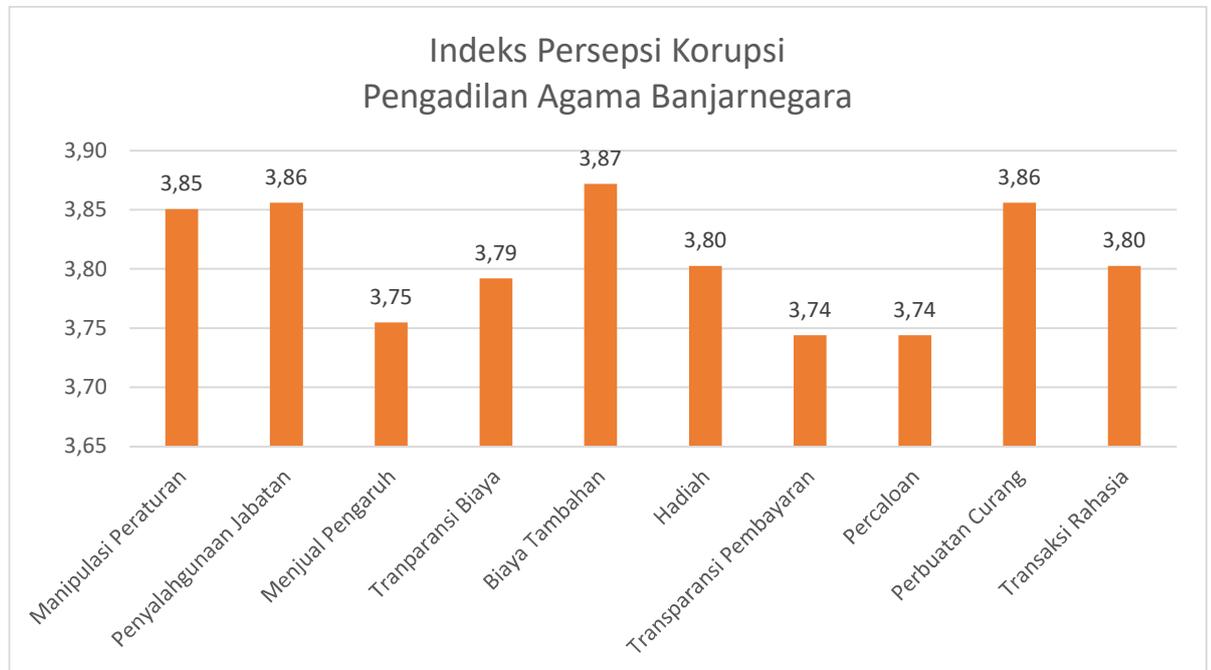
Seperti yang terlihat pada data, seluruh responden pada prinsipnya setuju bahwa tidak ada pemberian Transaksi Rahasia pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara.

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar 3,81

Gambar 3.15

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Banjarnegara



Indeks 3,81 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 – 4,00.

Tabel 3.1

Tabel Persepsi Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel Tabel 3.2
Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan
Pengadilan Agama Banjarnegara

No	Masukkan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan
1	-
2	-
3	-
4	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Banjarnegara diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,81** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,85
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,86
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,75
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,79
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,87
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,80
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,74
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,74
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,86
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,80

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks di atas 3,81 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Meski demikian berdasarkan hasil survey terdapat 3 (tiga) indikator terendah yang mempunyai nilai indeks di bawah 3,75 sehingga harus dilaksanakan perbaikan untuk semakin meningkatkan persepsi masyarakat. Indikator-indikator tersebut yaitu:

1. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,75
2. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,74
3. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,74

Adapun perbaikan yang disarankan adalah:

1. Semakin menggiatkan kampanye anti percaloan karena dimungkinkan banyak pihak eksternal yang mengaku sebagai pegawai pengadilan untuk membantu proses pengurusan perkara.
2. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan agar masyarakat berperkara secara langsung di Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Mempublikasi biaya berperkara dan biaya PNBK di berbagai kanal informasi, baik itu melalui banner di dalam dan luar gedung kantor juga melalui website dan media sosial.
4. Mempublikasikan pelayanan gratis biaya untuk pos bantuan hukum, gratis berperkara untuk masyarakat tidak mampu dan gratis layanan informasi

Lampiran

Tabulasi Hasil Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi

No	Umur	Jenis Pelayanan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Persepsi Korupsi									
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	49	1	1	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	21	1	2	2	5	4	5	6	4	4	6	6	4	5	4
3	32	1	2	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	32	1	2	2	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6
5	28	1	1	2	5	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6
6	29	1	2	3	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	42	1	1	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	43	1	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	59	1	2	4	8	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6
10	28	1	1	3	4	6	6	5	6	6	5	6	5	5	5
11	40	1	1	3	5	4	6	6	4	6	6	6	6	6	6
12	34	1	2	4	4	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6
13	25	1	2	3	8	6	4	6	5	6	6	6	6	6	6
14	42	1	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	35	1	1	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
16	40	1	2	3	5	6	6	6	3	6	6	3	6	6	6
17	16	1	2	3	8	4	4	4	6	6	6	6	5	5	4
18	33	1	1	2	4	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6
19	30	1	1	4	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20	48	1	1	4	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6
21	42	1	2	4	5	6	6	5	5	4	6	4	4	6	5
22	21	1	2	2	5	6	4	6	6	6	6	3	5	6	6
23	38	1	1	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
24	45	1	1	4	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
25	55	1	1	4	1	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6
26	39	1	1	2	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
27	24	1	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
28	23	1	2	3	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
29	24	1	1	4	6	6	6	4	6	6	4	5	3	5	4
30	35	2	2	1	8	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6
31	45	2	2	2	5	6	6	6	4	4	6	4	6	6	6
32	27	1	2	3	4	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6
33	19	1	1	2	6	6	6	4	6	5	4	5	3	5	4
34	32	1	2	3	6	6	6	6	3	6	6	3	6	6	6
35	41	2	1	4	4	6	6	4	6	5	4	5	3	5	4
36	38	2	1	6	1	6	6	4	6	5	4	5	3	5	4
37	35	2	1	2	5	6	6	6	6	6	4	6	6	6	6
38	50	2	1	2	5	5	6	6	6	6	6	6	4	6	6
39	48	2	2	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
40	27	1	2	3	5	6	6	6	4	4	5	3	6	6	6
41	35	2	2	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
42	35	1	2	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
43	41	1	1	4	5	6	6	4	6	5	4	5	3	5	4
44	37	2	1	2	6	6	6	4	6	5	4	5	3	5	4
45	47	1	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
46	40	2	1	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
47	50	1	2	2	5	6	4	4	6	6	6	6	6	6	6
48	34	1	2	2	5	6	6	5	6	6	6	6	6	5	4
49	28	1	2	4	3	5	6	6	5	6	5	5	5	5	6
50	42	1	2	3	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6
51	40	1	1	2	5	5	5	6	5	5	6	5	6	6	6
52	30	2	2	4	5	6	6	6	5	6	5	6	6	6	6
53	38	2	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
54	33	1	1	4	4	5	6	5	6	6	5	6	5	6	5
55	41	2	2	2	8	4	6	4	5	6	6	5	6	5	5
56	25	1	2	4	8	6	6	6	5	6	6	6	6	5	5
57	32	2	1	3	8	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6
58	50	2	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
59	37	1	2	2	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
60	42	2	2	2	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6
61	34	2	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
62	37	1	2	2	8	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6
63	30	1	1	4	4	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
64	58	2	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
65	50	1	2	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
66	42	1	1	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
67	35	1	2	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
68	30	1	1	2	5	6	3	5	6	6	6	6	5	6	6
69	30	1	2	4	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
70	24	1	2	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
71	26	2	2	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
72	56	2	1	3	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
73	20	1	1	3	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
74	26	1	1	4	4	5	6	6	6	6	5	6	5	5	5
75	23	1	2	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
76	49	1	1	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
77	23	1	1	2	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
78	24	1	2	4	3	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5

